

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN
Volume 8, Nomor 1, Juli 2020
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab	: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Pemimpin Redaksi / Redaktur	: Mardisontori, S.Ag., LLM.
Editor	: Akhmad Aulawi, S.H., M.H. Khopiatuziadah, S.Ag., LLM. Nita Ariyulinda, S.H., M.H. Kuntari, S.H., M.H. R. Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn. Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. Achmadudin Rajab, S.H., M.H. Meirina Fajarwati, S.H., M.H.
Mitra Bestari	: Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Alfitri, S.Ag., M.Ag., LL.M., Ph.D.
Desain Grafis	: M. Nurfaik, S.H.I. Yuwinda Sari Pujiанти, S.H. Noval Ali Muchtar, S.H.
Sekretariat	: Fahmi Asy'ari, S.Sos. Ani Maryani, S.E. Muhamad Yunus, S.H. Syarifudin Ade Hardha Gunawan

Alamat
Redaksi Prodigy Jurnal Perundang-Undangan
Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI
Gedung Setjen dan Badan Keahlian DPR RI
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Kode Pos 10270
e-mail: prodigyjurnalilmiah@gmail.com dan jurnal.prodigy@dpr.go.id

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN
Volume 8, Nomor 1, Juli 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Pengantar Redaksi.....	iv
Lembar Abstrak	v-xx
Pelaksanaan Ibadah Haji Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji <i>Mujamalah</i> dalam Perspektif Pelindungan Konsumen	
<i>Ihsan Badruni Nasution</i>	1-17
Analisis Mengenai Kelemahan Pengaturan tentang Desa Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	
<i>Laily Fitriani</i>	18-36
Analisis Yuridis tentang Upah Minimum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari Perspektif Konstitusi	
<i>Bagus Prasetyo</i>	37-52
Analisis Yuridis terhadap Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Mengenai Penaan Pajak Alat Berat dan Alat-Alat Besar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
<i>Arif Usman</i>	53-66
Pengaturan Hakim <i>Ad Hoc</i> sebagai Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014	
<i>R. Priharta Budiprasetya E.P.Y</i>	67-82
Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang	
<i>Arifudin</i>	83-97
Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN/BUMS terhadap Tindak Pidana Korupsi	
<i>Ghina Inas Nabila</i>	98-115
Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
<i>Yanuar Putra Erwin</i>	116-132

Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian <i>Aryani Sinduningrum</i>	133-148
Implementasi Keadilan dalam Penetapan Putusan Sidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara <i>in Absentia</i> <i>Cakra Budi Prasetyo</i>	149-166
Pembatasan Kepemilikan Modal Asing di Bidang Komunikasi dan Informatika terhadap Kepentingan Nasional <i>Dahlia Andriani</i>	167-185
Pilihan Kebijakan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia Bekas Pejuang Asing <i>Islamic State of Iraq And Syria (ISIS)</i> <i>Trisuharto Clinton, S.H.</i>	186-203

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 8 Nomor 1, Juli 2020. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 12 (dua belas) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 12 (dua belas) tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Pelaksanaan Ibadah Haji Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji Mujamalah dalam Perspektif Pelindungan Konsumen; Kedua, Analisis mengenai kelemahan pengaturan tentang Desa Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Ketiga Analisis Yuridis tentang upah minimum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari Perspektif Konstitusi; Keempat, Analisis Yuridis terhadap Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 mengenai Pengenaan Pajak Alat Berat dan Alat-Alat Besar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Kelima, Pengaturan Hakim Ad Hoc Sebagai Pejabat Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014; Keenam, Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang

Selanjutnya Ketujuh, Pemenuhan unsur kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN/BUMS terhadap tindak Pidana Korupsi; Kedelapan, Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Kesembilan, Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Kesepuluh, Implementasi Keadilan dalam Penetapan Putusan Sidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara *In Absentia*; Kesebelas, Pembatasan Kepemilikan Modal Asing di Bidang Komunikasi dan Informatika terhadap Kepentingan Nasional; dan Keduabelas, Pilihan Kebijakan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia bekas Pejuang Asing *Islamic State Of Iraq And Syria* (ISIS).

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2020

Redaksi

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Ihsan Badruni Nasution

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Pelaksanaan Ibadah Haji Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji Mujamalah dalam Perspektif Pelindungan Konsumen

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 1-17

Pengaturan mengenai ibadah haji dengan menggunakan visa haji *mujamalah* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah). Namun demikian dalam pelaksanaannya belum mampu menjamin hak jemaah haji sebagai konsumen jasa dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), khususnya dalam aspek pembinaan, pelayanan (transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan), dan pelindungan terhadap jemaah haji. Tulisan ini bertujuan untuk memahami masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan visa haji *mujamalah* dan pelindungan konsumennya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, tulisan ini menyimpulkan bahwa permasalahan ibadah haji dengan visa *mujamalah* terjadi karena visa *mujamalah* sulit diketahui jumlah dan distribusinya oleh pemerintah serta belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah perlu segera membentuk peraturan menteri agama untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konsumen, melakukan pengawasan, sosialisasi dan pembinaan terhadap konsumen, serta melakukan penegakan sanksi administratif yang tegas sesuai undang-undang.

Kata kunci: ibadah haji, visa *mujamalah*, pelindungan konsumen.

The Implementation of Hajj of Indonesian Citizens with Visa Mujamalah in Consumer Protection Perspective

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 1-17

Hajj with visa mujamalah has been regulated by the Law Number 8 of 2019 regarding the Implementation of Hajj and Umrah. However, its implementation has not been able to guarantee the rights of pilgrims as the consumers of Special Hajj Group Organizer (PIHK), specifically on coaching, services (transportation, accommodation, consumption, and health), and the protection of pilgrims. This study aims to understand the problems that occur in the implementation of hajj with visa mujamalah and its consumer protection. Using normative juridical method through literature review, this study found that problem of hajj with visa mujamalah happens because the number of visa mujamalah and its distribution are difficult to control by Indonesian government. The provision of visa mujamalah also require implementing regulations concerning the implementation of hajj with visa mujamalah. To deal with these problems, the Government shall immediately form a ministerial regulation to prevent the violations of the rights of pilgrims as consumers, as well as supervise, socialize it to the consumers, and enforce administrative sanctions according to the law.

Keywords: hajj, visa mujamalah, consumer protection

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Laily Fitriani

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Analisis Mengenai Kelemahan Pengaturan tentang Desa Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 18-36

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government* membuka jalan bagi penguatan komunitas desa adat yang berdasarkan nilai-nilai lokal yang ada. Undang-Undang ini juga mengakui keberagaman desa yang ada di Indonesia dan dianggap lebih mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat dengan menganut salah satu asas yaitu asas rekognisi yang merupakan pengakuan terhadap hak asal usul dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Undang-Undang tentang Desa telah berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diundangkan. Dalam kurun waktu tersebut belum ada desa adat yang didaftarkan atau belum terbentuk desa adat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Desa. Banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi diantaranya kesulitan bagi desa adat untuk memenuhi persyaratan sebagai desa adat atau tidak adanya Peraturan Provinsi mengenai penataan desa walaupun telah adanya peraturan daerah kabupaten kota mengenai penetapan desa adat. Metode penulisan yang digunakan dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif, yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan dari penulisan ini yaitu perlunya perubahan UU tentang Desa antara lain mengenai pengertian desa dan desa adat, pembentukan desa adat, status kelurahan menjadi desa adat, hak asal usul, dan pengelolaan hak ulayat.

Kata kunci: kelemahan pengaturan, desa adat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Analysis of Weakness Regulations Regarding Traditional Village in Law No. 6 of 2014 about Village

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 18-36

Law No. 6 of 2014 concerning Villages combining the function of self-governing community with local self-government opens the way for the strengthening of indigenous village communities based on existing local values. This law also recognizes the diversity of villages in Indonesia and is considered to be more recognizing the existence of customary community unity by adhering to one of the principles of recognition which is a recognition of the rights of origin and the principle of subsidiarity, namely the establishment of local scale authority and local decision making for the benefit of the village community. The Village Law has been in force for 6 (six) years since it was promulgated. During this period, no traditional villages were registered or traditional villages were not formed in accordance with the provisions of the Village Law. Many factors cause this to happen including difficulties for traditional villages to fulfill the requirements as traditional villages or the absence of Provincial Regulations regarding village structuring despite the existence of regional regency regulations on the establishment of traditional villages. The writing method used in the discussion is the normative juridical analysis method, which uses primary legal material in the form of laws and regulations, the status of kelurahan into a customary village, original rights, and management of customary rights.

Keywords: weaknesses of regulation, traditional villages, Law No. 6 of 2014 concerning Villages

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Bagus Prasetyo

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis tentang Upah Minimum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari Perspektif Konstitusi

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, Juni 2016, halaman 37-52

Hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap warga negara. Namun, salah satu peristiwa di bidang ketenagakerjaan yang selalu menjadi polemik di setiap akhir tahun yaitu mengenai ketetapan naiknya upah minimum. Salah satu cara pemerintah dalam membantu dunia usaha dan pekerja yaitu dengan membuat suatu sistem sehingga ada kepastian mengenai kenaikan upah setiap tahunnya. Penulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana pengaturan upah minimum dalam UU tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana pengaturan upah minimum ditinjau dari Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan upah minimum dalam UU tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan pengaturan upah minimum ditinjau dari Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai upah minimum dalam UU tentang Ketenagakerjaan terdapat pada BAB X khususnya dalam bagian kedua, dari pasal 88 sampai dengan pasal 98. Pemerintah melalui UU tentang Ketenagakerjaan dan PP No.78 Tahun 2015 yang mengatur mengenai upah minimum telah memberikan dasar hukum sebagai upaya memberikan penghasilan yang layak bagi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaturan upah minimum sebagai jaring pengaman sosial merupakan upaya agar setiap tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa peran negara untuk melindungi pihak yang lemah, yang dalam hal ini adalah buruh melalui hukum/peraturan perundang-undangan dan pengaturan upah minimum dalam UU tentang ketenagakerjaan merupakan bentuk pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Kata kunci: konstitusi, ketenagakerjaan, pesangon.

**Juridical Analysis Concerning Minimum Wages in Law Number 13 of 2013
Concerning Employment Reviewed from Constitutional Perspective**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 37-52

The right to work and to receive fair and appropriate remuneration and treatment in an employment relationship is a guarantee as well as the constitutional rights of every citizen. However, one of the events in the field of employment that always becomes polemic at the end of each year is the determination of minimum wage increases. One way for the government to help the business world and workers is to create a system so that there is certainty about the increase in wages each year. This writing raises the issue of how the minimum wage regulation in the Law on Labor and how the minimum wage regulation is reviewed from Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This writing method uses the normative juridical method with the statutory approach. The regulation on minimum wages in the Law on Manpower is contained in Chapter X especially in the second part, from article 88 to article 98. The government through the Law on Manpower and PP on Wages that regulates minimum wages has provided a legal basis as an effort to provide a decent income for labor to fulfill their daily needs. The minimum wage regulation as a social safety net is an effort so that every workforce can fulfill their living needs properly as outlined in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is based on the consideration that the role of the state to protect the weak party, which in this case is labor through laws / regulations and minimum wage regulations in the Law on manpower is a manifestation of Article 28D paragraph (2).

Keywords: constitution, employment, severance pay

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Arif Usman

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Analisis Yuridis terhadap Pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 Mengenai Pengenaan Pajak Alat Berat dan Alat-Alat Besar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 53-66

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Pengaturan pajak dan retribusi daerah tersebut saat ini diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang PDRD). Sepanjang berlakunya UU tentang PDRD terdapat beberapa kali permohonan pengujian UU tentang PDRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan hanya 4 (empat) permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim. Salah satu putusan yang dikabulkan oleh MK yaitu Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 terkait dengan pengenaan pajak alat-alat berat dan besar. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 berimplikasi yuridis bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor sehingga tidak bisa dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Mahkamah juga menegaskan bahwa terhadap alat berat tetap dapat dikenakan pajak namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum baru dalam peraturan perundang-undangan untuk mengenakan pajak terhadap alat berat yang antara lain dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UU tentang PDRD.

Kata kunci: pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor, alat berat

Juridical Analysis of the Opinion of the Court in the Decision of the Constitutional Court Number 15/PUU-XV/2017 Regarding the Imposition of the Tax for Heavy and Large Equipment in Law Number 28 Year 2009 Concerning Regional Taxes and Regional Retribution

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 53-66

In the framework of funding governance, development and public services in the regions within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, regions have the right to impose levies on the public that are regulated under the Act. The regulation of regional taxes and levies is currently regulated and stipulated by Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies (Law on PDRD). Throughout the enactment of the Law on PDRD, there have been several applications to review the Law on PDRD against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI to the Constitutional Court (MK) and only 4 (four) requests were granted by the panel of judges. One of the decisions granted by the Constitutional Court is Decision Number 15 / PUU-XV / 2017 related to the taxation of heavy and large equipment. This paper was prepared using a normative juridical approach using the statutory approach. Decision Number 15 / PUU-XV / 2017 has juridical implication that heavy equipment is not a motorized vehicle so it cannot be subject to Motorized Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB). The Court also emphasized that heavy equipment could still be taxed but the legal basis for taxing heavy equipment was not because the heavy equipment was part of the motorized vehicle. Therefore, a new legal basis is needed in the legislation to impose tax on heavy equipment which can be done, among others, by making changes to the Law on PDRD.

Keywords: local taxes and levies, motor vehicle tax, heavy equipment

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

R.Priharta Budiprasetya E.P.Y

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

**Pengaturan Hakim *Ad Hoc* Sebagai Pejabat Negara Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 67-82

Status hakim diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU tentang ASN). Adapun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 20 April 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan konsep bahwa hakim *ad hoc* bukanlah termasuk dalam pengertian hakim yang dikategorikan sebagai pejabat negara. Akan tetapi dalam pertimbangan putusan tersebut, MK berpendapat bahwa penentuan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi sejak putusan MK ini dikeluarkan sampai dengan sekarang belum ada pengaturan dalam bentuk undang-undang yang dikeluarkan oleh pembentuk UU, yaitu Pemerintah dengan DPR. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 dan bagaimanakah pengaturan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 dan untuk mengetahui pengaturan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014. Pembahasan tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang menjelaskan permasalahan yang menghambat pengaturan jabatan hakim *ad hoc* sebagai pejabat negara di Indonesia. Simpulan dari permasalahan ini adalah hakim *ad hoc* hanya bisa menjabat sebagai pejabat negara jika pengaturannya dituang dalam bentuk undang-undang.

Kata kunci: hakim *ad hoc*, jabatan hakim, pejabat negara

**Ad Hoc Judgment Regulation as a Post-State Official Officer
of Constitutional Court Number 32 / PUU-XII / 2014**

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 67-82

Judge status is regulated in Article 1 number 4 of Law Number 43 of 1999 concerning Amendment to Law Number 8 of 1974 concerning Personnel Principle as amended by Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (Law on ASN) . As for the Constitutional Court Decision Number 32 / PUU-XII / 2014 which was read on April 20, 2015, the Constitutional Court (MK) reinforced the concept that ad hoc judges were not included in the definition of judges categorized as state officials. However, in considering the ruling, the Constitutional Court is of the opinion that the determination of ad hoc judges as state officials is an open legal policy which can be changed at any time by the legislators. However, since the Constitutional Court's decision was issued until now there has been no regulation in the form of laws issued by the legislators, namely the Government and the Parliament. Based on the description there are problems, namely how is the ad hoc judge arrangement as a state official before the issuance of the Constitutional Court ruling Number 32 / PUU-XII / 2014 and how is the ad hoc judge arrangement as a state official after the ruling of the Constitutional Court Number 32 / PUU-XII / 2014. The purpose of this paper is to find out the ad hoc judge arrangement as a state official before the issuance of the Constitutional Court ruling Number 32 / PUU-XII / 2014 and to find out the ad hoc judge arrangement as a state official after the ruling of the Constitutional Court Number 32 / PUU-XII / 2014. The discussion of this paper uses the normative juridical approach method by examining the substance and positive law that explains the problems that hinder the regulation of ad hoc judges as state officials in Indonesia. The conclusion from this problem is that an ad hoc judge can only serve as a state official if the arrangements are outlined in the form of a law.

Keywords: ad hoc judge, the post of judge, state officials

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Arifudin

Universitas Islam As-Syafi'iyah

Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 83-97

Penataan ruang merupakan upaya pemerintah agar ruang darat, laut, dan udara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu membutuhkan pengelolaan yang bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna. Agar ideal, penataan ruang perlu ada pengendalian. Dalam UU tentang Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang diantaranya dilakukan melalui pengaturan sanksi administratif. Namun demikian, sanksi administratif nampaknya belum menimbulkan pengendalian tata ruang, sebab masih terdapat berbagai pelanggaran hukum pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum pemanfaatan ruang menurut UU tentang Penataan Ruang, dan bagaimana bentuk sanksi administratif yang ideal terhadap penegakan hukum pemanfaatan ruang. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan permasalahan hukum implementasi penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum pemanfaatan ruang menurut UU tentang Penataan Ruang, serta menemukan bentuk sanksi administratif yang ideal terhadap penegakan hukum pemanfaatan ruang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif dengan pendekatan *doctrinal* terhadap hukum dan menggunakan data sekunder berupa dokumen dan literatur. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan hukum pemanfaatan ruang belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan teknis mengenai bentuk pengawasan, jangka waktu penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi yang lewat waktu, nilai nominal dan dasar perhitungan pada penetapan denda administratif dan mengenai mekanisme dan prosedur pengenaan masing-masing sanksi administratif. Adapun bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang telah memiliki bentuk sanksi yang ideal karena tidak menghilangkan bentuk sanksi yang khas dalam hukum administrasi.

Kata kunci: penegakan hukum, pemanfaatan ruang, pengembangan sanksi administratif

Implementation of Administrative Sanctions in Enforcing Law of Space Used

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 83-97

Spatial planning is an effort by the government to be utilized for the people's welfare. Therefore it requires wise, efficient and effective management. To be effective, spatial planning needs to be controlled. In Law Number 26 Year 2007 regarding Spatial Planning (Law on Spatial Planning), control of spatial use is carried out through administrative sanctions. Control efforts through administrative sanctions do not appear to have resulted in effective spatial control, because there are various violations of spatial use law that are not in accordance with spatial planning and zoning regulations. Research questions in this paper are how the implementation of administrative sanctions in law enforcement of spatial use according to the Law on Spatial Planning, and what is the ideal form of administrative sanctions for law enforcement of spatial use. The purpose of this paper is to find legal issues regarding the implementation of administrative sanctions in law enforcement of spatial use According to the Law on Spatial Planning, and find the ideal form of administrative sanctions against law enforcement for spatial use. Writing articles using the normative juridical research method examines how the implementation of administrative sanctions in law enforcement in the use of space utilization laws according to the Law on Spatial Planning and what forms of administrative sanctions are ideal for law enforcement for spatial use. The results and conclusions of this study are that law enforcement has not yet been implemented. This is due to the absence of further arrangements regarding the form of supervision, the period of application of sanctions and the implementation of sanctions that are past (expired), the nominal value and basis of calculation on the determination of administrative fines and regarding the mechanisms and procedures for the imposition of each administrative sanction. As for the form of administrative sanctions for violations in the field of spatial planning already have an ideal form of sanctions because it does not eliminate the form of sanctions that are typical in administrative law.

Keywords: Law enforcement, spatial use, development of administrative sanctions

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Ghina Inas Nabila

Universitas Indonesia

Pemenuhan Unsur Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bumn/Bums terhadap Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 98-115

Kesadaran perusahaan terhadap Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Saat ini pengaturan TJSL diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU tentang Perseroan Terbatas) dan masih bersifat *debatable* dan *resistance* mengenai pelaksanaan TJSL yang *mandatory*, dan/atau *voluntary*. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai status keuangan dana TJSL sebagai keuangan negara atau bukan keuangan negara. Hal ini akan sangat berdampak terhadap proses penegakan hukum atas penyalahgunaan dana TJSL apakah masuk klasifikasi tindak pidana korupsi, atau tindak pidana umum. Penulisan ini disusun dengan metode *normative legal research* dengan meneliti terhadap taraf sinkronisasi hukum terkait TJSL, keuangan negara, tindak pidana korupsi dan menyandingkan dengan doktrin-doktrin hukum. Sehingga dapat menjawab ambiguitas hukum atas status keuangan dana TJSL serta pertanggungjawabannya. Dalam UU PT pelaksanaan TJSL merupakan tanggungjawab direksi yang harus dilaporkan dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun, beberapa kasus penyalahgunaan dana TJSL masih diperiksa dan diadili sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh luasnya pengertian dari keuangan negara yang mencakup kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah. Terpenuhinya unsur keuangan negara menjadi senjata bagi negara untuk menjerumuskan segala tindak pidana dalam perseroan sebagai tindak pidana korupsi dan dianggap merugikan keuangan negara.

Kata kunci: kepastian, tanggung jawab sosial dan lingkungan, keuangan negara, korupsi

Fulfilling the Elements of State Financial Losses Abuse of Funds of Social and Environmental Responsibility of State Owned Enterprises / Privat Owned Business Entity Against Corruption Crime

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 98-115

The Corporate awareness of social and environmental responsibility (TJSL) has become a priority for companies that carry out their business activities in the field and/or related to natural resources. The Implementation of social and environmental responsibility that mandatory or voluntary in the law Number 40 Year 2007 on Limited Company is still debatable because there is no definite rules about the financial status of social and environmental responsibility as state or not state finance. This will greatly affect to law enforcement on the social and environmental responsibility abuse as corruption or general crime. This writing used normative legal research method by examining of laws related to social and environmental responsibility, state finance, corruption, and legal doctrines. So that can answer the legal ambiguity and accountability over the financial status of social and environmental responsibility funds. The implementation of social and environmental responsibility in the law of limited company is the director responsibility which reported in the annual report and accounted for at shareholders meeting. However, in the several cases social and environmental responsibility fund abuse still being examined as corruption. This is due of comprehension breadth of state finance that includes separated assets in the state/regional companies. The fullfilment of elements on the state finance cause every criminal offense in the limited company as a corruption and it is considered detrimental to state finance

Keywords: certainty, social and environmental responsibility, state finance, corruption

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Yanuar Putra Erwin

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

**Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 116-132

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Melalui undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Namun dalam pelaksanaannya, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih menyisakan banyak permasalahan hukum. Beberapa permasalahan hukum yang dimaksud antara lain adalah jenis perselisihan yang masih membingungkan; kurang optimalnya peran mediasi, konsiliasi, dan arbitrase; tidak tercerminnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Hubungan Industrial; serta putusan pengadilan yang sulit untuk dieksekusi. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan untuk mengetahui substansi apa saja yang perlu diatur di dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan adalah metode analisis yuridis normatif. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan analisa yuridis secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata kunci: Urgensi, Undang-Undang, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

The Urgency of Amendment to Law Number 2 of 2004 Concerning Industrial Relations Disputes Settlement

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 116-132

Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes regulates the settlement of disputes between entrepreneurs and joint entrepreneurs with workers or unions caused by disputes of rights, disputes of interest, disputes over termination of employment and disputes between unions in one company. Through this law, it is expected to realize the legal objectives of justice, benefits, and legal certainty. However, in its implementation, the process of resolving industrial relations disputes regulated in Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes Settlement that still leaves many legal issues. Some of the legal issues in question are types type of industrial relations dispute that are still confusing; less optimal role of mediation, conciliation, and arbitration; the principle of justice which is quickly, simply, and at a low cost is not reflected in the Industrial Relations Court; and court decisions that are difficult to execute. Based on these legal issues, the purpose of this paper is to find out the urgency of amending Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes and to find out what substances need to be regulated in amendments to Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. The writing method used by the writer in the discussion is the normative juridical analysis method. Based on this, an in-depth juridical analysis is needed on Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Dispute.

Keywords: Urgency, Act, Industrial Relationship Disputes Settlement

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Aryani Sinduningrum

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 133-148

Pengertian asuransi adalah perjanjian pertanggungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dengan tujuan mengalihkan risiko pemegang polis kepada perusahaan asuransi dan pemegang polis wajib untuk melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Walaupun asuransi bermanfaat mengalihkan risiko, tapi dalam kegiatan perasuransian ini juga memiliki potensi risiko yaitu gagal bayar terhadap klaim dari pemegang polis. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme ganti kerugian terhadap pemegang polis apabila perusahaan asuransi di likuidasi dan dampak hukum belum terbentuknya Lembaga Penjamin Polis. Tulisan ini menyimpulkan bahwa mekanisme ganti kerugian terhadap pemegang polis apabila perusahaan asuransi dilikuidasi adalah dalam kondisi belum adanya Lembaga Penjamin Polis maka menggunakan dana asuransi, apabila dana asuransi tidak cukup dapat menggunakan dana jaminan. Jika dana jaminan ini ternyata tidak cukup juga maka ditempuh penyelesaian dengan cara pembayaran kepada pemegang polis dalam kedudukannya sebagai kreditur preferen yang akan diutamakan. Saran dari Penulis adalah untuk segera membentuk Lembaga Penjamin Polis bersama pihak-pihak terkait serta menyusun landasan hukumnya dan menjadikan skema pembayaran dalam Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga terdahulu yang sudah ada untuk diadopsi pada Lembaga Penjamin Polis dengan berbagai penyesuaian. Sementara itu, dampak hukum dari belum terbentuknya Lembaga Penjamin Polis berdasarkan undang-undang adalah tidak ada perlindungan hukum yang kuat kepada pemegang polis, mengganggu stabilitas perekonomian negara jika pemerintah terpaksa harus melakukan *bailout*, menjadi preseden buruk di industri perasuransian dan dapat mengakibatkan industri asuransi *collaps*, serta amanat dari Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum terimplementasi dengan baik.

Kata kunci: perasuransian, polis, penjaminan

The Urgency of Establishment of Policy Guarantee Institutions Based on Law Number 40 of 2014 Concerning Insurance

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 133-148

Definition of insurance is the agreement between the insurance company and the policyholder with the aim of transferring the risk of the policyholder to the insurance company. Although insurance is useful in transferring risk, but it also has another potential risk, which is failure of insurance company to pay the claims of policyholder. The purpose of this paper is to find out the compensation mechanism for policyholder if the insurance company is liquidated and the legal impact of the Policy Guarantee Institution has not yet been established. This paper concludes that the compensation mechanism for policyholder if the insurance company is liquidated is in condition that the Policy Guarantee Institution has not been established, then using insurance funds, if insufficient insurance funds so it can use collateral funds. If the collateral funds turn out to be insufficient, then it is settled by payment to policyholder in his position as the preferred creditor to be prioritized. The legal impact of not yet been established the Policy Guarantee based on act is there is no strong legal protection for policyholder, disrupting the economy stability of the country if government is forced to conduct a bailout, set a bad precedent in insurance industry, causing the insurance industry collapsed, as well as the mandate of Article 53 paragraph (1) Law Number 40 of 2014 concerning Insurance has not been implemented properly. The author suggest to immediately establishing the Policy Guarantee Institution with related parties as well as drafting the legal basis and making the payment scheme in the Deposit Insurance Institution to be adopted in the Policy Guarantee Institution with various adjustment.

Keywords: insurance, policy, guarantee

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Cakra Budi Prasetyo

Universitas Indonesia

Implementasi Keadilan dalam Penetapan Putusan Sidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Secara *in Absentia*

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 149-166

Fiat justitia ruat caelum, keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Bukan hukum, tapi keadilanlah yang harus ditegakkan. Kontradiktif terhadap sistem penyelesaian perkara lalu lintas pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung No.12 Tahun 2016. Sistem peradilan yang meniadakan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di pengadilan dan langsung ditetapkan besaran denda yang harus dibayarkan. Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana keadilan dapat ditegakkan bilamana terdakwa tidak pernah dihadirkan untuk diperiksa dalam acara sidang. Apakah model penyelesaian semacam ini menjawab tantangan atau hanya memperkeruh hukum di Indonesia? Perlu studi ilmiah dalam menjawab pertanyaan tersebut. Demi terjaganya kualitas dalam penegakkan keadilan, naskah ini disusun secara empiris untuk meneliti efektivitas, serta efisiensi penerapan kebijakan tersebut. Dengan metode *Random Sampling* 200 responden didapatkan jawaban, 163/200 responden di DKI Jakarta menyatakan efisien dalam waktu, 182/200 menyatakan pasrah dengan besaran denda yang telah diputus oleh hakim. Cepat, dan sederhana, namun keadilan tak lagi menjadi perbincangan utama dalam persidangan lalu lintas. Sangat dikhawatirkan hakim hanya sebagai corong hukum antara Undang-Undang dan putusan. Dua definisi yang berbeda antara tidak dihadiri oleh terdakwa, dengan tidak menghadirkan terdakwa. Sebagai lembaga penegak hukum, perlu memperbaiki kuantitas dan kualitas dalam menghadapi tantangan hukum demi tercapainya keadilan.

Kata kunci: keadilan, lalu lintas, birokrasi

The Implementation of Justice in the Court Decision of Traffic and Road Transportation Violations in Absentia

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 149-166

Fiat justitia ruat caelum, justice must be upheld even though the sky is falling. Not the law, but justice must be upheld. Contradictory to the system of settlement of traffic cases after the enactment of the Supreme Court Regulation No.12 of 2016. The justice system that eliminates the examination of traffic violations and road transport in the court and immediately determined the amount of the fine to be paid. This raises the question, how can justice be upheld if the defendant has never been presented for questioning at the hearing. Does this kind of settlement model answer the challenge or only make the law worse in Indonesia? Scientific studies are needed in answering these questions. For the sake of maintaining the quality in upholding justice, this manuscript was compiled empirically to examine the effectiveness and efficiency of the application of the policy. With the Random Sampling method, 200 respondents obtained answers, 163/200 respondents in DKI Jakarta declared efficient in time, 182/200 stated they were resigned to the amount of the fine that was decided by the judge. Fast, and simple, but justice is no longer the main topic in traffic trials. The judge is very worried only as a legal funnel between the Act and the decision. Two different definitions between not being attended by the defendant, and not representing the defendant. As a law enforcement agency, it is necessary to improve the quantity and quality in facing legal challenges for the achievement of justice.

Keywords: justice, traffic, bureaucracy

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Dahlia Andriani

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Pembatasan Kepemilikan Modal Asing di Bidang Komunikasi dan Informatika terhadap Kepentingan Nasional

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 167-185

Pembatasan terhadap kegiatan penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional sehingga tidak semua bidang usaha terbuka untuk PMA. Bidang usaha sektor komunikasi dan informatika merupakan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu yaitu batasan kepemilikan modal asing, salah satunya jasa akses internet dengan maksimal 67% kepemilikan asing yang sebelumnya 49%. Pembatasan nilai kepemilikan modal asing meningkat seiring dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan penanaman modal. Jika pembatasan modal asing terus dilonggarkan, maka hal tersebut dapat mengganggu upaya perlindungan terhadap kepentingan nasional khususnya di bidang ekonomi. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU tentang Penanaman Modal) yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan pengaturan pembatasan kepemilikan modal asing pada bidang usaha sektor komunikasi dan informatika terhadap kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU tentang Penanaman Modal telah mengatur mengenai perlindungan kepentingan nasional dan saat ini pengaturan pembatasan kepemilikan asing pada bidang usaha komunikasi dan informatika didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 44 Tahun 2016) yang sudah mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan nasional di bidang ekonomi.

Kata kunci: penanaman modal, pembatasan kepemilikan modal asing, kepentingan nasional

Foreign Capital Ownership Restriction of the Communication and Information Technology Fields on National Interests

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 167-185

Restrictions on foreign capital investment (PMA) activities are one form of protection of national interests so that not all fields of business are open to PMA. The communication and information technology business sector is an open business sector with certain requirements, namely restrictions on foreign capital ownership, one of which is internet access services with a maximum of 67% foreign ownership, which was previously 49%. The limitation on the value of foreign capital ownership increases in line with the direction of government policy in an effort to increase investment. If restrictions on foreign capital continue to lax, then this can disrupt efforts to protect national interests, especially in the economic field. This research with normative juridical method aims to find out the arrangement in the Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment (Law on Capital Investment) that provides protection for national interests and regulates restrictions on foreign capital ownership in the business sector of the communication and information sector on national interests. The results of this research indicate that Law on Capital Investment has regulated the protection of national interests and currently the regulation of foreign ownership restrictions in the communications and information technology business is based on Presidential Regulation Number 44 of 2016 concerning Lists of Business fields that are Closed to Investment and Business fields that are open with conditions to Investment (Presidential Regulation Number 44 of 2016) which already reflects the protection of national interests in the economic field.

Keywords: capital investment, restrictions on foreign ownership, national interest

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 8 NO. 1, JULI 2020

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Trisuharto Clinton, S.H.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

**Pilihan Kebijakan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia
Bekas Pejuang Asing *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)***

Jurnal Prodigy Vol. 8 No. 1, Juli 2020, halaman 186-203

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris oleh dunia, merekrut pejuang asing dari berbagai negara melalui propaganda di media sosial. Saat ini, ISIS telah dikalahkan oleh koalisi internasional, dan para pejuang asing ISIS menjadi tawanan perang. Terdapat permasalahan yang dihadapi negara-negara yang warga negaranya bergabung menjadi pejuang asing ISIS di Irak dan Suriah. Pemerintah Indonesia sampai kini belum mengambil kebijakan hukum yang jelas terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi pejuang asing ISIS di luar negeri terkait status kewarganegaraannya. Tulisan ini ditujukan untuk mengidentifikasi status kewarganegaraan WNI bekas pejuang asing ISIS dan menganalisis pilihan kebijakan hukum Pemerintah terhadap mereka. Metode penulisan adalah yuridis analitis dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukkan: Pertama, ISIS merupakan entitas insurgensi dan bukan negara, sehingga tidak menyebabkan WNI yang pernah menjadi pejuang asing ISIS kehilangan status kewarganegaraannya. Kedua, Politik Hukum Pemerintah Indonesia sebaiknya menerima mereka kembali ke Indonesia dengan mengadakan program deradikalisasi dan penjatuhan hukum pidana bagi WNI pejuang ISIS yang menjadi pelaku terorisme. Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu mempertegas ketentuan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan terhadap status kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung ataupun menjadi simpatisan organisasi atau kelompok terorisme di luar negeri. Kata kunci: ISIS, terorisme, insurgensi, beligerensi, kewarganegaraan

***Legal Policy Choice Toward Indonesian Citizen
as Former Foreign Fighters of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)***

Prodigy Journal Vol. 8 No. 1, July 2020, page 186-203

The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) set as an organization or terrorist group by the world, recruit foreign fighter from various countries through propaganda on social media. Nowadays, ISIS has been defeated by an international coalition, and its foreign fighters become prisoners of war. There is a problem for all countries that its citizens joined as foreign fighters of ISIS in Iraq and Syria. The Indonesian government have not determined clear legal policy toward Indonesian Citizens (WNI) who have been former foreign fighters of ISIS abroad related to their citizenship status. This paper aims to identify the status of citizenship for Indonesian Citizen as former foreign fighters of ISIS and to analysis the legal policy choice of Indonesian government for them. The writing method was juridical analysis with descriptive analysis writing specification. The result of this paper show: First, ISIS is an insurgent entity not as a state, so it does not cause Indonesian citizens as former foreign fighters of ISIS lose their citizenship status. Second, the legal policy of Indonesian government should take back Indonesian citizens as former foreign fighters of ISIS to Indonesia, by conduct de-radicalization program and punish the Indonesian Citizen as former foreign fighter of ISIS who perpetrated the terrorism by criminal law. Moreover, The Indonesian government should to emphasize the laws and regulations on citizenship toward the status of Indonesian Citizens who joined or became sympathizer of terrorist organizations on groups abroad.

Keywords: ISIS, terrorism, insurgent, belligerent, citizenship